

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan (Suwanti, 2013). Pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum yang ditandai dengan adanya perbaikan kualitas kehidupan di segala bidang. Pembangunan juga perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan penyelesaian masalah kemiskinan (Marain dkk, 2014). Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Suwanti, 2013).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana prasarana produksi (Taufiq, 2016). Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggara pemerintah daerah sebagai sub sistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing propinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah harus mampu menghadapi

tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang di indikasikan dengan meningkatnya PDRB, serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang memiliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan daerah tersebut.

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan. Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi Negara berkembang. Sektor ini menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industri memberikan kontribusi terhadap PDRB, sumber devisa, serta mendorong bergeraknya sektor-sektor riil lainnya. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan besarnya PDRB sektor pertanian di Indonesia :

Tabel I.1
PDRB Indonesia menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian
pada Tahun 2014-2015

NO	Provinsi	2014	2015	Rata-rata
1	Aceh	34377	37595	35986
2	Sumatera Utara	121419	125903	123661
3	Sumatera Barat	41224	44439	42831.5
4	Riau	133550	145605	139577.5
5	Jambi	37968	43762	40865
6	Sumatera Selatan	54406	55257	54831.5
7	Bengkulu	14272	15429	14850.5
8	Lampung	75444	80517	77980.5
9	Kepulauan Bangka Belitung	10837	12066	11451.5
10	Kepulauan Riau	6450	7077	6763.5
11	DKI Jakarta	1719	1867	1793
12	Jawa Barat	120787	132489	126638
13	Jawa Tengah	140435	157202	148818.5
14	Yogyakarta	9769	10794	10281.5
15	Jawa Timur	208614	232283	220448.5
16	Banten	24944	28385	26664.5
17	Bali	22912	26255	24583.5
18	Nusa Tenggara Barat	19468	22432	20950
19	Nusa Tenggara Timur	20456	22766	21611
20	Kalimantan Barat	28529	30136	29332.5
21	Kalimantan Tengah	21181	23047	22114
22	Kalimantan Selatan	18753	20438	19595.5
23	Kalimantan Timur	36948	37779	37363.5
24	Kalimantan Utara	10121	10932	10526.5
25	Sulawesi Utara	17800	19827	18813.5
26	Sulawesi Tengah	31036	33644	32340
27	Sulawesi Selatan	68465	78735	73600
28	Sulawesi Tenggara	20198	21111	20654.5
29	Gorontalo	9512	10584	10048
30	Sulawesi Barat	12301	13851	13076
31	Maluku	7909	8273	8091
32	Maluku Utara	6196	6617	6406.5
33	Papua Barat	6273	6834	6553.5
34	Papua	17357	20186	18771.5

Sumber: BPS Indonesia

Pada tabel 1.1 dapat dilihat data PDRB Provinsi di Indonesia, disimpulkan dimana PDRB sektor pertanian tertinggi pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan nilai PDRB tahun 2014 yaitu 208614 dan pada tahun 2018 adalah 232283. Tertinggi kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai PDRB 2014 yaitu 140435 dan 2015 adalah 157202. Lalu posisi ketiga adalah Provinsi Riau dengan PDRB 2014 sebesar 133550 dan pada 2015 yaitu 145605. Kemudian PDRB sektor pertanian terendah pertama adalah Provinsi DKI Jakarta dengan PDRB 2014 yaitu 1719 dan pada tahun 2015 adalah 1867. Dan posisi terendah kedua yaitu Provinsi Maluku Utara dengan PDRB tahun 2014 sebesar 6196 dan pada tahun 2015 yaitu 6617. PDRB posisi ketiga di duduki Papua Barat dengan nilai PDRB 6273 lalu pada tahun 2015 sebesar 6834.

PDRB pada sektor pertanian di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berbeda-beda tiap daerah, tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa PDRB pada sektor pertanian di masing-masing daerah memiliki trennya sendiri. Beberapa daerah menunjukkan indikator dengan meningkatnya PDRB pada sektor pertanian. Berikut adalah tabel 1.2 yang menunjukkan besarnya PDRB sektor pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel I.2
PDRB Atas Dasar Lapangan Usaha Sektor Pertanian pada Tingkat
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014-2015
(Milliar Rupiah)

No	Kota/Kabupaten	2014	2015	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	7785,02	8716,04	8250,53
2	Kab. Banyumas	4991,34	5514,20	5252,77
3	Kab. Purbalingga	4896,94	5393,93	5145,44
4	Kab. Banjarnegara	4723,85	5132,04	4927,95
5	Kab. Kebumen	4994,61	5702,91	5348,76
6	Kab. Purworejo	3287,38	3596,55	3441,97
7	Kab. Wonosobo	4293,20	4647,01	4470,11
8	Kab. Magelang	5180,52	5646,62	5413,57
9	Kab. Boyolali	4967,51	5581,25	5274,38
10	Kab. Klaten	3284,13	3662,35	3473,24
11	Kab. Sukoharjo	2359,93	2657,13	2508,53
12	Kab. Wonogiri	6732,28	7259,77	6996,03
13	Kab. Karanganyar	3576,26	4004,74	3790,50
14	Kab. Sragen	4343,89	4742,72	4543,31
15	Kab. Grobogan	5693,22	6613,77	6153,50
16	Kab. Blora	4204,45	4628,76	4416,61
17	Kab. Rembang	3875,37	4168,48	4021,93
18	Kab. Pati	7486,27	8454,57	7970,42
19	Kab. Kudus	1814,64	2023,14	1918,89
20	Kab. Jepara	3102,60	3394,05	3248,33
21	Kab. Demak	4412,70	4957,47	4685,09
22	Kab. Semarang	4075,03	4519,31	4297,17
23	Kab. Temanggung	3734,88	4156,11	3945,50
24	Kab. Kendal	6067,67	6556,01	6311,84
25	Kab. Batang	3464,40	3809,62	3637,01
26	Kab. Pekalongan	2930,18	3269,00	3099,59
27	Kab. Pemalang	4753,48	5224,89	4989,19
28	Kab. Tegal	3565,02	3879,32	3722,17
29	Kab. Brebes	12781,20	14113,78	13447,49
30	Kota Surakarta	167,75	182,75	175,25
31	Kota Salatiga	446,44	492,43	469,44
32	Kota Semarang	1230,69	1372,45	1301,57
33	Kota Pekalongan	373,91	413,68	393,80
34	Kota Magelang	123,20	132,30	127,75
35	Kota Tegal	536,90	577,47	557,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Disimpulkan bahwa PDRB sektor pertanian pada 2014 – 2015 di tingkat Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, Pada tahun 2014 PDRB tertinggi pertama adalah Kabupaten Brebes dengan nilai 3336111 (miliar rupiah). Kabupaten Brebes pada tahun 2015 juga tertinggi nilai PDRB nya yaitu 191182 (miliar rupiah). Dan nilai PDRB terendah di sektor pertanian adalah di Kota Magelang pada tahun 2014 dengan nilai 405 (miliar rupiah). Dan PDRB provinsi magelang tahun 2015 adalah 335 (miliar rupiah). Pada setiap daerah Kabupaten/Kota tidak semua mengalami kenaikan pertahunnya, ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang mengalami kenaikan. Karena semua itu di dasari berbagai faktor tertentu yang bisa menaikkan atau menurunkan PDRB suatu daerah.

Salah satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian yaitu dengan pendanaan sektor pertanian yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang sebuah dinas untuk pembangunan sektor pertanian. Program pertanian yang dibuat diharapkan dapat membantu para petani dalam mengembangkan sektor pertanian di daerahnya. Program dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan akan suatu wilayahnya daerah perkotaan dan pedesaan (Suwanti, 2013).

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah

melalui instrument kebijakan dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya.

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi (Ratih, dkk, 2017). Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah, meskipun jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan namun jumlah penyerapan terhadap tenaga kerja masih menjadi yang terbesar dari sektor – sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, lebih di fokuskan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pengeluaran sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, karena belanja untuk pembangunan ditujukan untuk membiayai agen pembangunan dan dari pengeluaran ini akan dihasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menjadikan naiknya PDRB karena adanya kenaikan output agregat. Maka penulis tertarik untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB di tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB di tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB di tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB di tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan sektor pertanian di Jawa Tengah

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu panduan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pada sektor pertanian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut :

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat pertumbuhan sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah

sektor pertanian bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran – saran yang direkomendasikan kepada pihak – pihak tertentu atas dasar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN